

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Literature Review ialah sumber daya sekunder yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan dalam memperoleh keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu menjadi bahan referensi yang digunakan dalam menyusun kerangka teori dan dapat memberikan ide kepada peneliti terkait isu yang akan diteliti sehingga dapat membantu penelitian yang sedang berlangsung untuk menunjukkan orisinalitasnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan peneliti yaitu hasil dari penelitian (Widjaja, 2022) yang berjudul “efektivitas satuan polisi pamong praja dalam penertiban penyelenggaraan reklame di kota malang provinsi jawa timur” penelitian ini memperoleh temuan yaitu adanya petunjuk bahwa efektivitas satpol pp malang melakukan pemantauan terkait penegakan reklame belum cukup efektif. Kekurangan tenaga, cara kerja yang tidak ditentukan secara normal, infrastruktur yang kurang, kurangnya kesadaran pelanggar reklame, ketidakjelasan identitas pelanggar reklame, serta kinerja dan sistem insentif kerja yang buruk menjadi faktor penghambat.

Efektivitas Satpol PP dalam pengelolaan pelaksanaan poster kurang efektif karena SDM yang kurang, infrastruktur yang kurang memadai, penyelenggara poster tidak mengetahui kepatuhan terhadap aturan dan sistem kinerja dan motivasi kerja yang optimal. Dengan memberikan peluang kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka sendiri dan mengoptimalkan sistem reward dan punishment keanggotaan, maka meningkatkan efektivitas terhadap pengaturan promosi di Kota Malang. Pengusulan terkait kualitas sumber daya manusia di satpol pp kota malang, merupakan penghargaan kepada satpol pp kota malang terhadap kerja keras dan motivasi kerja petugas. Maka dapat dilaksanakan pemantauan terhadap kondisi sarana prasarana khususnya kondisi terhadap

sarana prasarana yang digunakan untuk penertiban papan reklame. Dengan demikian, penertiban reklame berjalan dengan melalui pembelian kembali mobile crane dan pemeliharaan infrastruktur, serta peningkatan komunikasi dan kontak yang penyelenggara reklame mengenai peraturan pemasangan reklame yang berlaku di kota Malang.

Hasil penelitian yang berjudul “karakteristik kawasan historis koridor jalan pasar besar kota malang” yang dilakukan oleh (Riztyawan & Maulidi, 2017) menemukan bahwa koridor jalan pasar besar malang diperlukan penanganan dalam pelestarian kepada eksistensi bangunan antik & daerah. Maka dari itu, dibutuhkan adanya pelestarian terhadap daerah koridor jalan pasar besar kota malang yang mempunyai nilai sejarah terkait bangunan antik & nilai sejarah daerah yg terdapat. Analisis yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis naratif untuk mengidentifikasi fitur kawasan, analisis kronis-sinkronis untuk menentukan perkembangan wilayah, dan signifikansi budaya untuk tindakan melestarikan bangunan lama. Dari analisis yang dilakukan, kawasan dan bangunan harus mendapatkan tindakan konservasi untuk menjadi peninggalan sejarah, serta mempertahankan karakteristik kawasan. Selanjutnya terdapat berupa penguasaan perdagangan & jasa dengan kepadatan bangunan yang tinggi dilengkapi pola grid yang merupakan ciri menonjol dari koridor jalan pasar besar malang.

Sedangkan hasil penelitian dari (Satyahasuda et al., 2022) yang berjudul “Konsep Penertiban penataan Reklame Di Koridor Heritage Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kota Malang” dimana dalam menemukan Konsep tata letak billboard Koridor Jalan Jendral Basuki Rahmat Heritage dibuat dengan mempertimbangkan penempatan billboard, perhitungan kapasitas billboard dan posisi elemen lainnya. Hasil pengembangan konsep menunjukkan bahwa kapasitas periklanan berbeda pada setiap segmen dan jarak minimum antar papan reklame berbeda. Reklame yang dipasang dengan kondisi eksisting tidak sepenuhnya mengikuti tata letak reklame. Hal ini menunjukkan bahwa konsep layout

reklame perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan perhitungan kapasitas reklame dan posisi elemen lainnya agar tertata dengan baik di sepanjang Koridor Heritage di Jalan Jendral Basuki Rahmat, Kota Malang.

Hasil Penelitian yang berjudul “kebijakan media reklame di koridor jalan soekarno-hatta kota malang” yang dilakukan oleh (Tobona et al., 2021) menunjukkan bahwa dimana di dalam hasil standar untuk mengidentifikasi karakteristik media periklanan dan membandingkannya dengan kesesuaian penempatan diverifikasi menggunakan efek media periklanan terhadap estetika visual, yang diketahui melalui metode analisis berdasarkan skala spasial manusia, sebagian besar panel-panel reklame di koridor jalan ruas 1 dan 2 Soekarno – Hatta tidak dapat dilihat secara detail oleh pengguna jalan, namun pada ruas 1 dan 2 terdapat 23 formasi yang merupakan ruang sempit dan berat yang membuat ritme terasa oleh para pengguna jalan. Jalur pengguna tidak seimbang, karena tidak ada yang membuat urutan dan pengulangan seimbang.

Sedangkan penelitian selanjut nya berjudul “implementasi peraturan walikota malang no 27 tahun 2015 tentang penertiban penataan reklame”(Yanto et al., 2018) dalam hal ini penelitian ini menemukan bahwa aturan untuk menerapkan aturan pada pesanan promosi belum sepenuhnya dialihkan dengan benar. Dari berbagai perspektif seperti Norma politik dan tujuan, komunikasi antara pemberdayaan organisasi dan pemberdayaan operasional, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, serta politik, telah dilaksanakan secara baik. Dari sisi sumber daya, terutama sumber daya manusia di salah satu instansi masih terdapat kekurangan. Pelaksanaan penyusunan poster ini didukung dengan kerja sama, dan SOP Namun minim kesadaran dari warga dan menjadi faktor penghambat.

Hasil Penelitian berjudul “arahan pengembangan koridor basuki rahmat kawasan kayutangan kota malang sebagai heritage tourism” yang dilakukan oleh (Rifqi et al., 2022)

ditemukan terdapat 11 faktor yang mempengaruhi koridor basuki-rahmat di kecamatan kayutangan untuk wisata heritage dengan menggunakan analisis Delphi. Setelah 11 faktor tersebut teridentifikasi, maka telah ditemukan arahan pengembangan koridor basuki-rahmat di kawasan kayutangan kota malang untuk wisata heritage. Menyeimbangkan fasad bangunan bersejarah, memperbaiki dan melindungi warisan bersejarah, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas dan daya jual, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan politik dalam pengembangan koridor basuki rahmat di kawasan kayutangan kota malang adalah focus dalam penelitian ini.

Selanjutnya Penelitian dari (Hendry Kusprpto, 2015) yang berjudul “*Arrangement On Street Furniture At Soekarno-Hatta Corridor*” menemukan yang dimana terdapatnya Kekurangan serta kebutuhan dalam penertiban penataan street furniture di koridor jalan Kota Sukarno Hatta Malang. Mengetahui jenis, jumlah, ukuran dan lokasi street furniture dengan menggunakan analisis karakteristik furnitur jalanan berdasarkan lokasi saat ini merupakan beberapa analisis yang dapat digunakan. Selain menganalisis kesesuaian standar street furniture, juga mengkaji furnitur jalan dan mengevaluasi serta menentukan kesesuaian street furniture yang ada dalam menentukan penertiban penataan yang benar ditentukan saat menganalisis penempatan furnitur jalan penertiban penataan furnitur jalan yang tepat. Berdasarkan analisis maka organisasi akan mendapat bentuk yang sesuai dengan kondisi koridor jalan sukarno hatta.

Sedangkan hasil Penelitian dari (Mujtaba Habibi, 2014) berjudul “implementasi kebijakan penertiban penataan reklame di kota malang” pelaksanaan kebijakan dan penertiban penataan reklame mencakup perizinan terhadap pemasangan papan reklame menunjukkan adanya pengawasan dan penertiban di lapangan.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, merupakan gerakan yang dilakukan dengan bantuan menggunakan otoritas dalam mengatasi beragam masalah yang ada di masyarakat., Kebijakan Publik menurut Eysstone adalah “hubungan entitas pemerintah dengan lingkungannya (hubungan yang terjalin antara entitas/pemerintah “Rangkaian langkah atau tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, dan otoritas (pemerintah) dalam lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) bahwa kebijakan yang diusulkan akan berguna untuk mengatasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”

Definisi menyatakan kebijakan publik sebagai sesuatu masih dikerjakan atau dilarang lagi oleh pemerintah terhadap suatu kepentingan public yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan diarahkan pada tujuan tertentu demi kepentingan public serta keinginan positif untuk umum.

1) Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan public mengambil bentuk agar memudahkan publik mengerti akan kebijakan. Tiga bentuk kebijakan publik menurut Nugroho (2006:31), antara lain :

- a. Kebijakan yang mengatur pelaksanaan serta penerapan kebijakan tentangnya dan memiliki bentuk kebijakan berupa instruksi yang dikeluarkan melalui pejabat public yang melapor kepada bupati, wali kota, gubernur, menteri, termasuk kebijakan bersifat mikro.
- b. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945: hukum/peraturan pemerintah dari pada undang-undang:

Peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, merupakan kebijakan public yang bersifat makro, umum, atau mendasar.

c. Ruang lingkup yang berupa peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, peraturan menteri, dan surat edaran departemen. Kebijakan juga bisa berbentuk perintah eksekutif bersama atau SKB antar bupati, wali kota, gubernur, menteri merupakan kebijakan public merupakan bersifat menengah, serta efisien dalam sebuah implementasi.

2) Tahap – tahap perumusan kebijakan public

Tahapan dalam perumusan kebijakan public yaitu proses yang besar serta saling berkaitan antara satu dengan yang lain dikarenakan melibatkan berbagai pihak antara lain pembuat kebijakan itu sendiri, public atau masyarakat yang terkena dampak positif ataupun negative dari pembuatan kebijakan itu sendiri serta pihak lain. Salah satu tahapan mendasar dari proses kebijakan public yaitu perumusan kebijakan. Proses ini menentukan sesuatu yang menjadi batasan dan ruang lingkup dalam menentukan sebuah kebijakan. Berikut merupakan tahapan perumusan kebijakan menurut beberapa ahli. Menurut Dunn (2003:24), tahap – tahap perumusan kebijakan dalam rangka memecahkan masalah-masalah public antara lain:

“Penyusunan sebuah agenda, formulasi terkait kebijakan, adanya adopsi kebijakan, implementasi suatu kebijakan, dan penilaian terhadap kebijakan.”

Di atas menjelaskan proses perumusan kebijakan public meliputi beberapa tahap yang sistematis. Lalu menurut Winarno (2014:35) kebijakan public terdapat 5 tahap dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan agenda

Sebelum dipilih dan ditunjuk ke dalam sebuahh agenda publik, para pejabat berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Beberapa

isu telah ditempatkan dalam agenda kebijakan para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak dapat diselesaikan sama sekali, sementara permasalahan yang lain di tetapkan menjadi fokus pembahasan atau bahkan ada juga permasalahan yang tertunda untuk waktu yang cukup lama karena beberapa alasan.

2. Tahapan formulasi Kebijakan

Isu-isu yang sudah menjadi agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah telah diidentifikasi untuk kemudian dicari solusi terbaik dari masalah tersebut. Pemecahan masalah didasarkan pada berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Seperti halnya perjuangan menempatkan suatu masalah dalam agenda kebijakan, pada tahap ini masing-masing actor “berperan” dalam fase pembuatan kebijakan dengan mengusulkan solusi terbaik atas pemecahan masalah.

3. Tahapan adopsi kebijakan

Di antara banyak alternative kebijakan yang diajukan pembuat kebijakan, salah satu alternative ini akhirnya diambil dengan dukungan semua legislative, kesepakatan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi profil elite jika tidak dilaksanakan. Akibatnya, keputusan agenda kebijakan dipandang sebagai alternatif dari masalah yang perlu dilaksanakan, yaitu dilaksanakan oleh lembaga administrative dan kelompok pemerintah di tingkat yang lebih rendah. Kebijakan yang diusulkan, dikerahkan dan dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tingkat pelaksanaan ini berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain. Beberapa implementasi kebijakan didukung oleh pelaksana (implementors), tetapi yang lain mungkin ditentang oleh pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada langkah ini, kebijakan yang diterapkan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dikembangkan telah menyelesaikan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dirancang untuk mencapai dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menentukan skala, criteria dan standar untuk mengevaluasi kebijakan publik yang memiliki dampak yang diinginkan.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

A. Definisi implementasi kebijakan publik

Implementasi “implement” berarti “provide a means to achievement” (menyediakan alat bantu atau sarana untuk melakukan sesuatu) “to have a actual effect on” (memiliki pengaruh). Bardach, dikutip oleh Agustino (2006:138) menyatakan bahwa :

“Suatu program dan kebijakan secara umum terlihat bagus di atas kertas. Singkatnya, slogan yang menyenangkan para pemimpin dan para pemilih bahkan lebih sulit didengar. Apalagi sulit untuk menerapkannya dalam bentuk dan cara yang menyenangkan semua orang, termasuk mereka yang dianggap klien”

Kebijakan dikatakan sukses jika dari rencana, implementasi (pelaksanaan) dengan pengendaliannya. Menurut Nugroho (2009:501) menunjukkan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan adalah 20%, sisanya 60% adalah pelaksanaan, 20% terakhir merupakan bagaimana kita menangani implementasi. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2012:135) menjelaskan pentingnya implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah program dinyatakan efektif atau dikembangkan merupakan inti dari perhatian implementasi

kebijakan, arahan kebijakan termasuk upaya untuk mengelolanya dan konsekuensi serta dampak nyata terhadap masyarakat atau peristiwa”

Para ahli lain yang mendefinisikan tentang implementasi kebijakan yaitu Meter dan Horn, yang dikutip oleh (Wahab, 2012:135) proses implementasi kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, public, maupun pihak swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurut Anderson sebagaimana yang kutipan (Subarsono,2005:12), implementasi kebijakan ialah tentang “siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, apa yang dilakukan, dan dampak dari isi kebijakan”. Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo menyatakan secara ringkas “implementasi adalah proses mempraktikkan rencana” (Pasolong 2011:57)

Langkah penting dalam proses kebijakan publik merupakan pengertian dari pelaksanaan kebijakan. Program kebijakan wajib dilaksanakan dengan tepat sehingga memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan (Winarno, 2014: 146). Pandangan ini ditegaskan Udoji di kutip (Wahab, 2012:126), yang menyatakan bahwa “implementasi kebijakan itu penting, bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan dapat berupa tujuan atau rencana baik yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Berbagai definisi pelaksanaan kebijakan di atas, terlihat sangat jelas pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah dan melibatkan aktor – aktor lain dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut dengan tujuan sebagai berikut: tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tiga hal dilihat dari pelaksanaan kebijakan yaitu, mencakup tujuan dan sasaran kebijakan, adanya aktivitas dalam rangka mencapai tujuan, serta hasil dari kegiatan tersebut.

B. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Model pelaksanaan kebijakan sangat berguna untuk memahami proses implementasi kebijakan saat berlangsung. Menurut Leon dan Leon yang dikutip oleh (Nugroho, 2009:502) mengatakan bahwa :

“Pendekatan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi tiga generasi. Generasi pertama, pada tahun 1970-an memahami pelaksanaan kebijakan sebagai persoalan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Pada tahun 1980-an, masuk untuk generasi kedua generasi yang mengembangkan pendekatan yang bersifat “dari atas ke bawah” dalam kebijakan implementasi. Pandangan ini lebih menitikberatkan pada tugas – tugas birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan yang didefinisikan secara strategi. Generasi ketiga pada 1990-an, dikembangkan oleh sosiolog Malcolm L. Goggin, mengemukakan gagasan bahwa perubahan perilaku actor pelaksana kebijakan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”

C. Model George C. Edward

George C. Edward III, model yang dikembangkan untuk mengimplementasi langkah-langkah kebijakan disebut efek implementasi langsung dan tidak langsung. George C. Edward telah menunjukkan bahwa masalah utama kebijakan publik yang gagal adalah kurangnya perhatian terhadap beberapa bentuk pelaksanaan kebijakan. Edward III yang dikutip (Subarsono, 2011: 90-92), menegaskan bahwa ada beberapa faktor penentu utama, keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- I. Sumber daya, secara jelas dan konsisten, kebijakan tetap tidak akan berjalan efektif. Jika tidak memiliki variable sumber daya untuk melaksanakannya maka penerapan tidak bisa berjalan dengan efektif.

Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, seperti keterampilan kinerja hingga sumber daya keuangan.

- II. Struktur Birokrasi, ialah struktur organisasi yang tanggung jawab atas kebijakan yang berpengaruh signifikan dengan penerapan kebijakan. Aspek struktur organisasi meliputi fragmentasi (SOP). Struktur organisasi yang panjang dan bertele-tele cenderung menimbulkan red-tape dan control, yaitu prosedur birokrasi yang sulit dan berbelit, sehingga kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.
- III. Komunikasi, salah satu variable yang menjadi syarat dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang jelas, maka para implementor mudah mengetahui mengenai hal yang harus dilakukan. Kemudian terkait tujuan serta sasaran kebijakan yang perlu dikomunikasikan terhadap kelompok target guna mengurangi gangguan penerapan. Pengintegrasian tersebut disebut juga dengan koordinasi.
- IV. Disposisi, seorang implementor harus memiliki karakter dan ciri seperti sifat, komitmen, kejujuran, serta karakter demokratis. Jika melaksanakan perintah dengan jujur, maka pelaksana bisa mengimplementasikan kebijakan secara baik seperti yang diharapkan oleh kebijakan. Saat pola pikir atau cara pandang pelaksana berakibat proses dalam penerapan kebijakan menjadi kurang efektif.

Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) memiliki faktor yang menjadi perhatian terkait disposisi dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi

Pelantikan birokrasi, terkait pola pikir dalam pelaksana akan menciptakan batasan-batasan aktual terhadap implementasi cakupan

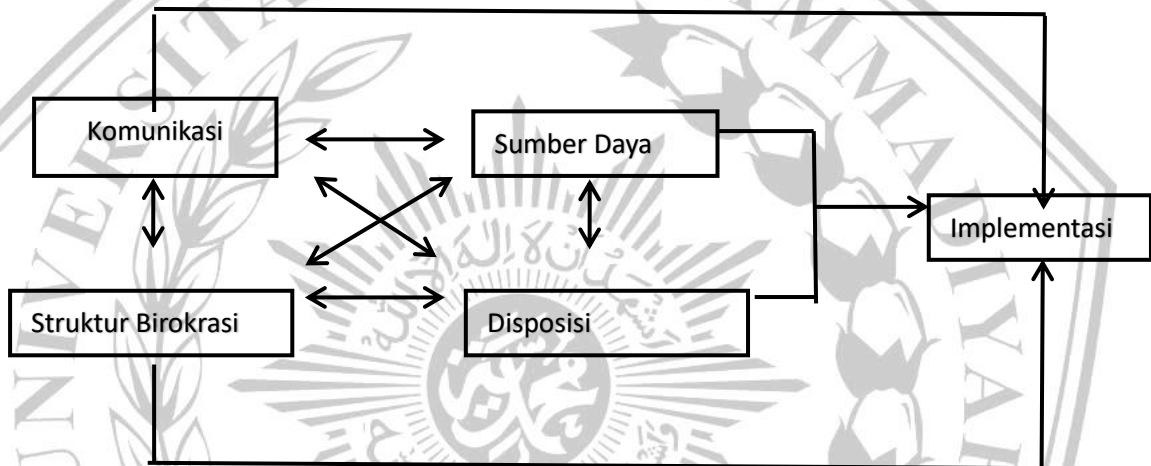
jika pegawai yang berlaku sekarang tidak lagi menegakkan peraturan secara baik. Maka pemilihan dan pengangkatan pegawai penegak hukum haruslah mereka yang memiliki komitmen terhadap peraturan yang telah ditetapkan, terutama terkait hobi masyarakat umum. Dalam hal pengangkatan birokrasi perlu untuk diperhatikan tentang dedikasi yang diberikan oleh personal pelaksana. Misalnya personil yang memiliki kinerja baik dapat diberikan penghargaan-penghargaan tertentu sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan semangat bagi personil-personil lain untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing. Pengangkatan birokrasi ini dijadikan sebagai bentuk manajemen karir sehingga jabatan yang diperoleh personil tidak hanya stagnan pada posisi tertentu saja tetapi bisa menduduki jabatan-jabatan strategis dengan insentif yang memadai.

2. Insentif

Insentif adalah usulan untuk mengatasi masalah sikap. masyarakat bergerak untuk kepentingannya sendiri, sehingga memanipulasi insentif pembuat kebijakan untuk mempengaruhi tindakan pembuat kebijakan. Dengan meningkatkan keuntungan atau melibatkan biaya tertentu, dapat menjadi faktor penentu dalam memotivasi pelaksana untuk melaksanakan perintah dengan benar. untuk tujuan kepentingan pribadi maupun organisasi.

2.4 Struktur Birokrasi

Aspek dari struktur organisasi adalah fragmentasi dan standar operasional procedure. Struktur organisasi penanggung jawab kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang tentu cenderung menimbulkan red –tape dan melemahkan pengawasan, yakni prosedur birokrasi yang berbelit – belit, yang pada akhirnya menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Gambar 1. Model Pendekatan George Edward III

Sumber: George C.Edward III dalam (Subarsono, 2011: 90-92)

A. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Model yang paling klasik adalah yang pertama, terutama yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Menurut Mehta dan Horn, sebagaimana dikemukakannya (Nugroho, 2009: –503), implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang sangat linier, dimulai dari kinerja kebijakan publik, kebijakan publik dan pelaksananya. Model ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam menerapkan metode implementasi kebijakan publik. Meter dan Horn memiliki enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Komunikasi antar penguatan organisasi dan penguatan aktivitas.

Untuk beberapa program, pelaksanaannya tentu saja merupakan agenda yang perlu koordinasi dan dukungan dari pihak lainnya. Proses dari koordinasi sendiri dapat menjadi sebuah mekanisme komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat diperlukan untuk menyukseskan suatu program.

2. Sumber daya

Pelaksanaan kebijakan tentunya sangat membutuhkan dukungan sumber daya, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya nonmanusia.

3. Standar dan Sasaran Kebijakan.

Untuk mencapainya, tujuan dan standar kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat terealisasi. Jika tujuan dan standar dari kebijakan tidak jelas, maka akan banyak interpretasi dan konflik di antar para pelaku implementasi.

4. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah ruang lingkup internal dan eksternal dari lingkungan yang terlibat. Menurut Van Meter dan Van Horn variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh aparat penegak hukum. Variabel ini meliputi sumber daya ekonomi dan lingkungan yang akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan: sejauh mana kelompok yang berpartisipasi mendukung atau ketidaksetujuan menghapus sifat opini publik di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Tiga hal ini menyangkut implementator, yaitu :

- a. dalam mengimplementasikan kebijakan, adanya pengaruh oleh kemauan terkait tanggapan pelaksana terhadap kebijakan tersebut.
- b. Kesadaran atas pemahaman tentang kebijakan

- c. Preferensi nilai oleh implementator dilihat dari intensitas indikator kecenderungan terhadap implementator.

6. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokusnya adalah pada lembaga pelaksana termasuk organisasi formal dan informal dalam pelaksanaan kebijakan publik. Yang dimaksud dengan karakteristik pelaksana adalah birokrasi, norma, dan pola relasional dalam birokrasi yang akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan yang di sampaikan oleh D.L. Weimer dan Aidan R.Vining (1999;398), terkait keberhasilan dan kegagalan dalam Pasolong (2010;59). Tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Menurut D.L. Weimer dan Aidan R.Vining terdapat, yaitu:

- a) Teori tersebut membentuk gagasan di balik kebijakan atau hubungan logis antara tindakan yang diambil dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya menggunakan logika di dalam kebijakan.
- b) Semua pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut membentuk suatu kesatuan yang produktif, jenis kerjasama inilah yang sangat dibutuhkan.
- c) Ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan komitmen yang diperlukan untuk mengelola pelaksanaannya. Implementasi suatu kebijakan melibatkan berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010;59) mengungkapkan kendala tersebut antara lain:

1. kelemahan terhadap kelembagaan, 2. hambatan terkait politik ekonomi serta lingkungan, 3. kekurangan sumber daya manusia di bidang administratif dan teknis, 4. kurangnya bantuan teknis. 5.kurangnya desentralisasi dan partisipasi, 6. pengaturan waktu, 7. sistem informasi yang kurang mendukung, 8. perbedaan

agenda tujuan antara aktor, 9. dukungan yang terus menerus, seperti halnya dalam hambatan dapat digolongkan menjadi hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, pendanaan, struktur organisasi, informasi.

2.5 REKLAME

2.5.1 Pengertian Reklame

Reklame sebagai penginformasian kepada masyarakat mengenai suatu produk, termasuk pujian, foto, dan lain-lain, agar produk dapat terjual lebih banyak, merupakan uraian dari kamus bahasa Indonesia. Dari sudut pandang Wikipedia, papan reklame ialah media iklan berskala gede dan sering di lokasi dengan lalu lintas tinggi, seperti persimpangan jalan raya yang sibuk. Reklame sendiri adalah serapan bahasa latin Papan reklame ditujukan untuk dilihat para pejalan kaki dan pengemudi yang berisikan iklan untuk dilihat. Konten papan reklame sering kali memiliki ilustrasi yang besar dan menarik beserta slogannya.

Iklan dan reklame biasanya dibedakan berdasarkan kategori lokasinya, seperti reklame dipergunakan untuk media periklanan luar ruang, sedangkan iklan digunakan untuk media iklan dalam ruangan. Secara etimologis, iklan maupun reklame memiliki arti yang sama. Iklan sendiri serapan bahasa Arab dari kata i'lan yang berarti pengumuman, sedangkan reklame artinya panggilan berulang, sehingga kedua istilah yang berkaitan dengan sarana periklanan ini memiliki arti yang sama yaitu, tindakan penyebaran informasi kepada public dan khalayak sasaran pesan tersebut. Peraturan dari wali kota malang nomor 27 tahun 2015 tentang tata letak reklame menetapkan bahwa reklame adalah suatu benda, alat, tindakan atau media yang menurut bentuk dan polanya.